

**PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DALAM KERANGKA OTONOMI  
DESA***INCREASING POLITICAL PARTICIPATION IN THE VILLAGE AUTONOMY  
FRAMEWORK***Patmisari\*, Eka Jumaidah Sumarsih, Yulianto Bambang**Setyadi, Wibowo Heru Prasetyo, Achmad Muthali'in  
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jalan A. Yani Sukoharjo 57162, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 25 September 2020

Disetujui : 20 Desember 2020

**Keywords:** political  
participation, society,  
village autonomy**Kata Kunci:**partisipasi politik,  
masyarakat, otonomi desa**\*) Korespondensi:**E-mail: [patmisari@ums.ac.id](mailto:patmisari@ums.ac.id)

**Abstract:** this study aimed to describe the implementation and effectiveness of village government programs to increase community political participation in Gonilan Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency. This research used descriptive qualitative. The informant was selected by purposive sampling. The informants consisted of six people, namely the village secretary, the head of the government, the general and administrative division, the planning committee, the head of the Voting Committee, and the secretary of the Voting Committee. Data collection techniques used interviews and documentation, while the validity of the data was tested by triangulation of data sources and techniques. Data analysis used an interactive model. The results showed that the Gonilan Village government program, in the form of pethuk stalls, village forums, and mobility broadcasting received positive responses from the community, because it became one of the attractions to increase the number of voters. These programs were effective for increasing political participation in Gonilan Village, this could be seen from the enthusiasm of citizens in participating in general election activities.

**Abstrak:** penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi dan efektivitas program pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan informan yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Informan terdiri atas enam orang yaitu sekretaris desa, kepala seksi (kasi) pemerintahan, kepala urusan (kaur) umum dan tata usaha, kaur perencanaan, ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber data dan teknik. Analisis data dilakukan dengan menerapkan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemerintahan Desa Gonilan, berupa Warung *Pethuk*, forum desa, dan *mobility broadcasting* mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat karena menjadi salah satu daya tarik untuk meningkatkan jumlah kehadiran pemilih. Program-program tersebut secara efektif dapat meningkatkan partisipasi politik di Desa Gonilan, hal ini dapat terlihat dari antusiasme warga dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika dilihat dari partisipasi politik pada proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, jumlah pemilih yang mencapai 193 juta menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat dalam majalah Forbes edisi April 2019 (Holmes, 2019). Berdasarkan laporan *The Economist Intelligence Unit* (2019) terkait indeks demokrasi 2019, Indonesia menempati posisi urutan ke-64 di dunia yang dilihat dari proses pemilihan umum dan kemajemukan, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan warga negara. Indeks demokrasi mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu dari 6,39 menjadi 6,48 dalam skala 10.

Di tingkat regional Indonesia menempati peringkat 11 akan tetapi masih tergolong ke dalam demokrasi yang cacat atau *flawed democracy*. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia agar menjadi *full democracy*. Peningkatan demokrasi di Indonesia dapat terlihat ketika pemerintah berupaya untuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan presiden tahun 2019. Ketika pemilihan presiden tahun 2019 dijadikan hari libur nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Hari Libur Nasional. Upaya pemerintah ini bertujuan mendorong angka partisipasi politik yang lebih tinggi.

Fakta-fakta tersebut dapat dianggap sebagai keberhasilan Indonesia dalam menjalankan demokratisasi secara implementatif, tidak sebatas pada teks konstitusi. Namun, proses pemungutan suara yang tidak diimbangi dengan kesadaran warga negara untuk menggunakan hak pilihnya justru berakibat pada problem sosial politik yang harus ditanggung setelahnya, sebagai contoh berpartisipasi karena terpengaruh politik uang atau *money politic* (Averus & Alfina, 2020). Kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat (Patmisari & Gafur, 2019). Selain kesadaran politik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga memengaruhi partisipasi politik

masyarakat. Jika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tinggi, maka mereka akan menaruh minat terhadap kegiatan politik, akan tetapi jika masyarakat memiliki kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka mereka kurang berminat dalam kegiatan politik. Masyarakat yang memiliki minat tinggi terhadap politik dapat meningkatkan tingkat kesadaran politik mereka (Amer, 2009). Semakin tertarik seseorang terhadap politik, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mengecek fakta-fakta (Robertson, Mourão, & Thorson, 2020). Hal ini akan membuat seseorang terhindar dari permasalahan berita politik yang salah yang biasa menimbulkan menyebarnya isu-isu politik yang berujung pada perpecahan.

Partisipasi politik menjadi sebuah kunci dalam sebuah negara demokrasi. Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terlebih dahulu meningkatkan minat atau ketertarikan masyarakat terhadap politik. Sistem pemilihan umum (pemilu) langsung juga membawa konsekuensi mahalannya ongkos politik sehingga pesta demokrasi tersebut dijadikan ajang untuk menggadaikan hak suara yang dimiliki (Badoh & Dahlan, 2010; Sholikin, 2019). Problem ini telah menjadi perhatian pada beberapa studi yang menitikberatkan pada kesadaran politik yang menjadi faktor penentu tingkat partisipasi politik masyarakat (Averus & Alfina, 2020; Usfinit, Suprojo, & Setyawan, 2014; Hendrik, 2011), bahkan kesadaran politik sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Aydın Çakır & Sekercioglu, 2016). Sayangnya, tidak banyak literatur yang mengkaji bagaimana upaya pembangunan kesadaran politik dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri.

Hal tersebut patut menjadi perhatian sebab tidak sedikit kearifan dalam perpolitikan di Indonesia juga berakar dari adat budaya yang tersemat pada nilai-nilai kultural. Masih banyak nilai-nilai kearifan lokal yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan masyarakat, termasuk membentuk budaya politik daerah setempat (Fikri, 2018). Nilai-nilai lokal atau kearifan lokal sangat memengaruhi sistem birokrasi yang ada sehingga budaya politik yang terbentuk di setiap daerah berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting untuk membentuk budaya politik masyarakat. Dimulai dari tingkat paling bawah

yaitu pemerintah desa dengan menggunakan otonomi desa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Partisipasi politik masyarakat yang tinggal di pedesaan memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dari pada masyarakat yang tinggal di perkotaan (Erdogan & Uyan-Semerci, 2017). Di pedesaan, kehidupan sosial yang bersifat tradisional dapat saling memengaruhi untuk menumbuhkan partisipasi politik. Sedangkan di daerah perkotaan yang mayoritas kehidupan lebih ke arah individual, mereka cenderung mengabaikan berbagai aktivitas politik di sekitarnya. Akan tetapi berbeda jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, di daerah perkotaan lebih banyak yang berpendidikan tinggi dibanding yang hidup di pedesaan. Masyarakat yang tinggal di perkotaan memiliki pemikiran yang berkembang sehingga lebih mengikuti perkembangan zaman dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan (Kusmanto, 2013). Masyarakat desa yang masih memegang teguh adat dan tradisi, cara berpikirnya masih rendah, kondisi ekonomi dan profesi dapat memengaruhi mereka untuk berpartisipasi dalam politik.

Desa Gonilan meskipun tergolong ke dalam masyarakat pedesaan (*rural community*), lebih bersifat kedaerahan karena menjadi batas terdekat dari zona rural peri-urban (Kurnaianingsih, 2013). Karakteristik zona rural peri-urban, jika dilihat dari kualitas sumber daya manusia, memiliki penduduk terdidik yang sangat sedikit (6,61%-8,43%) dibanding zona peri-urban sekunder (35,44%-47,76%) dan zona peri-urban primer (53,2%-71,21%). Jika dilihat dari aspek ekonomi, Desa Gonilan sebagian besar penduduknya (33,91%-45,69%) tergolong keluarga pra sejahtera. Oleh karena itu, Desa Gonilan lebih bersifat pedesaan, tetapi tingkat partisipasi politik masyarakatnya dapat dikatakan cukup tinggi. Hal ini tentunya didorong oleh pemerintah desa yang memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya. Pemerintah Desa Gonilan memiliki program tersendiri untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya. Oleh karena itu dibalik partisipasi masyarakat Desa Gonilan yang tergolong tinggi, studi ini fokus pada upaya yang dilakukan pemerintah Desa Gonilan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui otonomi desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipandang cukup penting untuk melakukan

penelitian tentang “Partisipasi Politik dan Otonomi Desa: Studi Kasus Program Pemerintahan Desa di Sukoharjo”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan implementasi dan efektivitas program pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Studi kasus memiliki keunggulan dalam membawa satu studi fokus pada permasalahan kontemporer dalam kehidupan nyata dengan cara observasi langsung dan wawancara sistematis. Pertanyaan utama yang terdiri dari “mengapa” dan “bagaimana” juga tepat dengan desain studi kasus (Yin, 2009). Wawancara secara *face to face* dilaksanakan kepada beberapa informan yang dipilih menggunakan *purposive sampling*, yakni mereka yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu berdasarkan pada kajian teoretik studi. Kelompok informan yang berhasil dihimpun yaitu sekretaris desa, kepala seksi (kasi) pemerintahan, kepala urusan (kaur) umum dan tata usaha, kaur perencanaan, ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS). Data yang terkumpul kemudian direduksi dan dikelompokkan menggunakan kode (*coding*) untuk kemudian disajikan dalam simpulan sementara (Miles & Huberman, 1992).

Salah satu tantangan bagi studi kualitatif ialah meminimalkan bias subjektif. Untuk itu, peneliti melakukan uji validasi dan kredibilitas menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang dilakukan tidak sebatas pada uji data dalam internal teknik pengumpulan data, semisal hasil wawancara antar informan, tetapi juga komparasi diantara hasil wawancara dan kumpulan artefak dalam bentuk dokumen-dokumen pemerintahan Desa Gonilan. Cara ini sekaligus untuk menguji konsistensi pengumpulan data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Setelah validasi data selesai, peneliti mengembangkan analisis tematik, yaitu analisis isi yang terdiri atas proses pengembangan kategori temuan utama (Patton, 2015). Tahapan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang implementasi dan efektivitas program pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Program Kerja untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Dengan jumlah pemilih mencapai 193 juta, sistem demokrasi Indonesia memerlukan partisipasi warga negara. Demokrasi terwujud ketika warga negaranya berpartisipasi dan ketika partisipasi tidak terbatas pada sekelompok warga yang memiliki bermacam-macam kemampuan (Erdogan & Uyan-Samerci, 2017). Partisipasi politik menjadi salah satu tolok ukur sistem politik yang dibangun oleh negara. Menurut Budiardjo (2013), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan memilih pimpinan negara baik secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi kebijakan pemerintah negara. Partisipasi politik diartikan sebagai tindakan warga negara yang berusaha memengaruhi atau mendukung pemerintah dan politik atau sebagai semua kegiatan sukarela yang dimaksudkan oleh setiap warga negara untuk memengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung pilihan politik di berbagai tingkat sistem politik.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi politik. Jika dilihat di abad 21 teknologi semakin berkembang, media digital meningkat, memberikan dampak pada partisipasi politik warga negara. Media digital berupa media *online* berperan penting dalam meningkatkan partisipasi warga negara. Ada hubungan positif antara penggunaan media digital dan partisipasi kewarganegaraan dan politik (Boulianne, 2020). Oleh karena itu perlu pemanfaatan media digital untuk menunjang negara demokratis. Selain itu, faktor penting yang memengaruhi seseorang untuk berpartisipasi politik adalah kesadaran politik. Kesadaran politik menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh masyarakat, tugas negara banyak yang terbengkalai (Yuliantina, 2016). Selain itu, pendidikan politik atau sosialisasi politik juga diperlukan dalam meningkatkan partisipasi politik. Pendidikan politik sudah seyogyanya diselenggarakan oleh pemerintah baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai dengan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa berperan sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan dapat mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai (Sugiman, 2018). Pemerintah desa berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi terendah langsung di bawah camat dan memiliki hak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Pemerintah desa yang juga merupakan pembina, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi dalam politik desa (Kusmanto, 2013). Pemerintah desa memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Pemerintah Desa Gonilan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat mempunyai tiga program yaitu Warung *Pethuk*, forum desa, dan *mobility broadcasting*. Warung *Pethuk* merupakan program yang diadakan pemerintahan desa guna menjaring masyarakat agar ikut serta dalam pelaksanaan pemilu di Desa Gonilan. Program Warung *Pethuk* merupakan kegiatan yang menyediakan berbagai nasi bungkus, *snack*, dan *souvenir* gratis bagi masyarakat yang akan memilih. Program ini diadakan pada saat pemilihan kepala desa. Program ini mendapat *support* dana dari para calon kepala desa. Syarat untuk mendapatkan aneka makanan dan *souvenir*, masyarakat harus datang ke TPS dengan menunjukkan KTP untuk mengikuti kegiatan pemilihan kepala desa. Akan tetapi program ini terbatas karena hanya disediakan untuk 300 orang disebabkan anggaran untuk program ini tidak banyak. Meskipun program Warung *Pethuk* ini hanya diadakan untuk pemilihan kepala desa saja, tidak untuk pemilihan umum yang lain karena keterbatasan anggaran, akan tetapi pemerintah desa tetap berupaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada saat pemilihan umum. Kasi Pemerintahan mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Gonilan sangat antusias dengan program ini.

Desa Gonilan juga mempunyai program lain dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu forum desa. Kegiatan forum desa dilakukan di berbagai lembaga yang ada di Desa Gonilan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pertemuan rukun tetangga (RT), dan karang taruna. Sasaran dalam kegiatan tersebut yaitu masyarakat umum, khususnya yang sudah menjadi daftar pemilih tetap di Desa Gonilan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait tata cara memilih dalam pemilihan umum. Informasi tersebut disampaikan oleh ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gonilan. Pelaksanaan forum desa bersifat *include* artinya tidak mengadakan, tetapi mengikuti setiap forum yang diadakan oleh masyarakat. Hal unik dari program ini yaitu ketika sosialisasi di PKK, diadakan semacam kuis kecil untuk menarik perhatian masyarakat dengan memberikan *doorprize* bagi yang bisa menjawab dengan benar. Kuis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan gubernur. Kegiatan forum desa dibuat menarik agar masyarakat mampu menangkap pesan dengan mudah apa yang disampaikan oleh panitia. Pesan lebih mudah ditularkan melalui perkumpulan di forum tersebut. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui akan ada proses politik yaitu diadakan pemilihan umum.

Forum desa ini merupakan wujud pendidikan politik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gonilan agar partisipasi politik masyarakat Desa Gonilan tinggi. Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran tentang hak dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu ada serangkaian usaha untuk meningkatkan kesadaran politik agar menunjang kelestarian nilai-nilai demokrasi dan UUD NRI 1945 sebagai budaya politik bangsa. Dalam Instruksi Presiden Indonesia Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda, pendidikan politik penting diberikan pada generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa Indonesia. Pendidikan politik tidak hanya diberikan kepada generasi muda, tetapi semua kalangan masyarakat juga perlu mendapatkan pendidikan politik. Jika di lingkungan persekolahan dalam kurikulum formal melalui pendidikan kewarganegaraan, di masyarakat juga ada pendidikan kewarganegaraan

kemasyarakatan. Pendidikan kewarganegaraan di persekolahan sebagai pendidikan politik, berperan dalam menumbuhkan pengetahuan, pemahaman peserta didik sehingga memiliki sikap dan perilaku terhadap politik dalam bingkai budaya politik.

Pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan *community civics* biasanya dilaksanakan dengan ceramah yang disampaikan kepada masyarakat melalui dakwah, keteladanan atau program pelatihan masyarakat yang disebut dengan *civic mission* (Sumantri, 2010). *Community civics* dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat atau kepala desa berupa sosialisasi kepada masyarakat, apalagi menjelang pemilu. Hal ini mengingat bahwa partisipasi politik masyarakat sangat penting dibutuhkan demi eksistensi negara demokrasi. Peran partisipasi politik bagi masyarakat yaitu sarana untuk memberikan masukan, kritikan, dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sedangkan bagi pemerintah, partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.

Melibatkan masyarakat desa dalam partisipasi politik bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat, tetapi membutuhkan usaha yang cukup berat dan waktu yang lama. Masyarakat desa beranggapan bahwa politik hanya untuk orang-orang yang berkedudukan tinggi. Usaha yang harus dilakukan untuk menghilangkan pemikiran negatif masyarakat yaitu perlu adanya pendekatan dan penyuluhan yang berguna agar pemikiran masyarakat tidak berprasangka negatif terhadap pemerintah. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat desa lebih tertarik dan berminat untuk berpartisipasi dalam politik, sehingga dapat memberikan kemajuan di desanya. Masalah partisipasi politik bukan hanya menyangkut watak atau sifat dari pemerintahan negara, melainkan lebih berkaitan dengan sifat dan karakter masyarakat suatu negara dan pengaruh yang ditimbulkannya (Kusmanto, 2013).

Partisipasi politik bertujuan untuk memengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya, sehingga pemerintah memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi (Dani, 2010). Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-

lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik. Wirahmat (2013) mengungkapkan bahwa ada dua indikator partisipasi politik, yaitu: (1) kesadaran politik, merupakan kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan pengetahuannya mengenai lingkungan masyarakat dan politik tempat tinggalnya dan (2) kepercayaan politik, yaitu penilaian terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada, apakah pemerintah dan sistem dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.

Untuk merangsang kesadaran politik masyarakat Desa Gonilan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, Desa Gonilan mengadakan program *mobility broadcasting*. Program ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat, khususnya Desa Gonilan terkait akan diadakan pemilihan umum. Selain itu, panitia membawa brosur terkait informasi pelaksanaan pemilihan umum yang nantinya akan ditempel di tempat tertentu maupun dibagikan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan hanya sehari dan satu putaran saja. Program ini memanfaatkan fasilitas berupa kendaraan untuk keperluan dan kepentingan desa.

Hasil kajian ini sejalan dengan kajian Arwiyah (2012) yang membuktikan bahwa keterlibatan warga negara dalam kehidupan politik pada pemilihan umum ataupun kepala daerah tidak terlepas dari status sosial ekonomi dan kualitas partai. Kajian serupa juga diungkapkan Suharyanto (2016) yang membuktikan bahwa surat kabar sebagai media penyampaian informasi politik memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat. Begitu pula kajian Aya (2013) yang membuktikan bahwa tokoh agama berperan aktif dalam memberikan nasihat, ceramah atau khotbah politik terhadap masyarakat ketika menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten. Peranan tokoh agama ini didasari dengan tanggung jawab iman terhadap masyarakat dalam rangkai membina, memotivasi, dan mengarahkan masyarakat dalam rangka turut aktif untuk berpartisipasi pada pilkada. Temuan serupa juga didapatkan Liando (2016) yang membuktikan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat sangat dinamis, namun yang menjadi persoalan adalah terkait motivasi. Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa ia memilih didorong oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan secara emosional. Untuk

meningkatkan partisipasi politik masyarakat, kualitas penyelenggara terutama di tingkat panitia *ad hoc* perlu dimaksimalkan dan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada masyarakat perlu digiatkan pula.

Kajian Muhaling (2014) yang membuktikan bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Sibarsel didukung oleh berbagai hal yakni, antusiasme yang tinggi menyebabkan pemikiran kritis tentang pelaksanaan dan minat untuk berpartisipasi cukup tinggi. Peran media massa sangat strategis dalam mendorong pengetahuan masyarakat terhadap proses pemilihan umum kepala daerah sehingga informasi berjalan cukup lancar dan menjadi salah satu sarana sosialisasi politik. Temuan yang serupa juga diungkapkan Wardhani (2018) yang membuktikan bahwa diharapkan pemilih pemula lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan politik dengan cara membagi waktu antara belajar dan mengikuti kegiatan politik.

#### ***Hambatan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat***

Pemerintahan desa dalam melaksanakan setiap program memiliki hambatan-hambatan. Hambatan dari program Warung *Pethuk* yaitu jumlah *snack* dan *souvenir* yang disediakan dibatasi untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya 300, banyak masyarakat yang kehabisan dan tidak mendapatkan. Hambatan lain dalam melaksanakan program ini yaitu hanya diadakan pada saat pemilihan kepala desa saja, karena dana yang dianggarkan tidak banyak. Saran agar program ini ke depan dapat berjalan dengan optimal yaitu anggaran untuk pelaksanaan Warung *Pethuk* harus ditambah agar masyarakat tidak kecewa dan program ini tidak hanya dilakukan pada saat pemilihan kepala desa saja, tetapi juga diadakan pada saat pemilihan umum yang lain. Pelaksanaan program Warung *Pethuk* seharusnya dari panitia, tetapi didanai dari calon kepala desa. *Snack* dan *souvenir* dibagikan oleh panitia penyelenggara, bukan dari calon kepala desa secara langsung.

Pemerintahan desa dalam melaksanakan forum desa juga mengalami hambatan yaitu waktunya terlalu mepet dengan kegiatan pemilihan umum. Tidak semua RT diadakan forum desa karena waktunya bersamaan dan waktu pertemuan sudah lewat dari jadwal yang sudah ditentukan. Solusinya dalam rangka

meningkatkan partisipasi politik masyarakat, tidak hanya dilakukan dari pemerintahan desa saja, tetapi juga dari instansi lain, khususnya instansi pemerintah. Program forum desa juga mengalami kendala waktu, karena panitia hanya menumpang agar dapat masuk di forum pertemuan yang diadakan oleh masyarakat desa setempat. Panitia diberi waktu yang singkat untuk melakukan sosialisasi, jadi penyampaian informasi tidak dapat maksimal. Panitia pada saat penyampaian informasi belum selesai, tetapi waktu yang diberikan forum sudah habis, jadi kegiatan forum desa belum maksimal dan informasi yang disampaikan kurang lengkap. Berbeda jika panitia mengadakan sendiri, jadi waktu milik panitia dan informasi akan tersampaikan dengan maksimal. Agar program forum desa dapat berjalan lebih maksimal, panitia TPS di tingkat desa perlu juga melakukan sosialisasi ke tempat TPS masing-masing dengan menempel pengumuman di masing-masing TPS.

Program *mobility broadcasting* yaitu salah satu program untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait waktu pemilihan umum dengan menggunakan kendaraan mobil *pick up*. Program ini diadakan pada waktu sore hari mengelilingi Desa Gonilan. Hambatan dari program ini yaitu karena kegiatan ini dilakukan di tempat terbuka, jika terjadi hujan maka diadakan di hari lain. Hambatan lain yang dihadapi pada saat pelaksanaan program ini yaitu kurangnya dana. Dana operasional harus mencukupi atau lebih banyak agar bisa dilakukan beberapa hari dan berjalan dengan maksimal.

### **Otonomi Pemerintahan Desa dan Alternatif Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat**

Otonomi adalah hak rakyat untuk mengatur pemerintahan di daerah dengan caranya sendiri sesuai dengan hukum, adat, dan tata kramanya (Toyamah, Febriany, & Mawardi, 2002). Desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya persoalan pengaturan birokrasi pemerintah di berbagai tingkat, tetapi juga berisi pengaturan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah Desa Gonilan memberikan kebebasan kepada masyarakatnya. Dahulu pemerintahan menganut sistem sentralistik yang berpusat pada pemerintah sehingga partisipasi politik kurang demokratis. Pemerintahan sekarang lebih demokratis karena menganut sistem desentralisasi.

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya politik otonomi daerah yaitu untuk memelihara hubungan antara pusat dengan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Kesatuan itu dapat direkat melalui desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan otonominya berdasarkan paradigma pluralisme.

Otonomi luas yang diberikan kepada daerah dapat mendorong dan memperkuat integrasi nasional (Toyamah, Febriany, & Mawardi, 2002). Pemerintah daerah semakin dituntut kesiapannya dalam merumuskan peraturan daerah, merencanakan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintah daerah dituntut pula menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada sehingga dapat menghadirkan nilai tambah ekonomis bagi masyarakatnya. Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah semakin mampunya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik (Enceng, Liestyodono, & Purwaningdyah, 2008).

Alternatif upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat di Desa Gonilan yaitu dengan mengadakan berbagai program. Program tersebut meliputi Warung *Pethuk*, forum desa, dan *mobility broadcasting*. Berdasarkan tabel 1, pemerintah Desa Gonilan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut diantaranya pengorganisasian, interpretasi, penerapan, adaptasi, dan efektivitas. Dari beberapa tahapan tersebut membuktikan bahwa ketiga program tersebut mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Gonilan. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dapat terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum. Antusiasme masyarakat Desa Gonilan sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Kusmanto (2013) yang membuktikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyosialisasikan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik. Badan

**Tabel 1. Tahapan Program Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Gonilan**

Tahapan	Indikator Kerja	Temuan
Perencanaan	Pengorganisasian	Pemerintah desa merencanakan kepanitiaian struktur organisasi yang terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat.
	Interpretasi	Pemerintah desa menyusun petunjuk teknis sesuai prosedur yang berlaku.
	Penerapan	Masyarakat desa harus bisa mematuhi dan mentaati prosedur yang telah ditetapkan.
	Adaptasi	Pemerintah desa harus mengembangkan program yang menarik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
	Efektivitas	Pemerintah desa merumuskan indikator-indikator keberhasilan dari pelaksanaan program. Pemerintah desa menyusun berbagai rencana evaluasi dari pelaksanaan program.
Implementasi program kerja	Pengorganisasian	Program Warung <i>Pethuk</i> , forum desa, dan <i>mobility broadcasting</i> dilaksanakan sesuai rencana yang sudah disusun.
	Interpretasi	Panitia penyelenggara Warung <i>Pethuk</i> , forum desa, dan <i>mobility broadcasting</i> dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis.
	Penerapan	Pelaksanaan program Warung <i>Pethuk</i> , forum desa, dan <i>mobility broadcasting</i> mendapat tanggapan positif dari masyarakat.
	Adaptasi	Masyarakat desa ikut serta setiap program kerja yang diadakan pemerintah desa.
	Efektivitas	Program kerja yang diadakan pemerintahan Desa Gonilan efektif untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
Efektivitas pelaksanaan program kerja	Pengorganisasian	Pelaksanaan program kerja agar efektif harus dibuat semenarik mungkin.
	Interpretasi	Pemerintah desa dalam melaksanakan ketiga program sesuai petunjuk teknis.
	Penerapan	Program diterapkan pada masyarakat Desa Gonilan yang sudah terdaftar dalam pemilih tetap.
	Adaptasi	Masyarakat Desa Gonilan berperan aktif dalam melaksanakan program.
	Efektivitas	Program pemerintahan desa sudah sesuai dengan tujuan yang direncanakan

Permasyarakatan Desa berperan dalam meningkatkan partisipasi politik, karena telah menyosialisasikan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan baik. Temuan serupa diungkapkan oleh Firmansyah dan Satmoko (2016) yang membuktikan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung mampu membawa iklim demokrasi ke arah yang lebih baik jika dilakukan dengan benar. Lembaga KPU diperlukan agar dapat mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang mampu dan berkompeten, dalam hal ini yaitu KPUD. KPUD Kota Mojokerto memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat saat pemilu (pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif).

Kajian serupa didapatkan Mudjiyanto (2012) yang membuktikan bahwa keterkaitan partisipasi politik dengan faktor literasi internet, berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan di antara kedua variabel memiliki hubungan signifikan pada  $df 4 \alpha 0,05$ . Temuan serupa juga diperoleh Nawawi (2009) yang membuktikan bahwa sebagai seorang bupati perempuan, Rina merepresentasikan kemampuan perempuan dalam mengambil kebijakan pemerintahan. Lewat program-programnya (yang meskipun masih terasa pengaruh gender dalam pemilihan namanya), Rina mencoba menunjukkan eksistensi perempuan dalam dunia publik. Saat ini perempuan juga memiliki kedudukan yang

sama untuk turut berperan dalam dunia politik. Berdasarkan temuan Patmisari & Gafur (2019) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat kesadaran politik antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, kesetaraan kewargaan di Indonesia semakin terealisasi dengan baik. Kajian lain diperoleh Putri (2016) yang membuktikan bahwa Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sosialisasi pemilu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu presiden 2014 di Kalimantan Timur. KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kegiatan sosialisasi interaksional dan sosialisasi *directional*.

Upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat di Desa Gonilan dengan program Warung *Pethuk*, forum desa, dan *mobility broadcasting* tergolong efektif dalam meningkatkan partisipasi politik jika dilihat dari antusiasme warga desa dalam mengikuti proses pemilihan umum. Program Warung *Pethuk* efektif dilakukan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam proses pemungutan suara. Program ini merupakan salah satu kewenangan pemerintah desa dalam mengurus anggaran desa sesuai undang-undang untuk menangani permasalahan partisipasi politik (Damayanti & Syarifuddin, 2020). Program ini diadakan pemerintah desa sebagai upaya memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemungutan suara. Pentingnya motivasi, dalam kajian ini berupa program *Warung Pethuk* memiliki kekuatan positif untuk mendorong partisipasi politik, terlebih lagi jika motivasi tersebut diadakan sebelum proses pemungutan suara (Lilleker & Koc-Michalska, 2016). Motivasi dan efektivitas politik menjadi dua syarat untuk partisipasi politik (van Houwelingen, 2017). Pemerintah desa memiliki peran yang efektif dalam upaya peningkatan partisipasi politik masyarakatnya dikarenakan pemerintah desa berhubungan secara langsung dengan masyarakat di wilayahnya. Keefektifan ini terlihat karena semakin besar ukuran populasi masyarakat, maka akan semakin sulit meningkatkan minat terhadap partisipasi politik (van Houwelingen, 2017). Motivasi dan efektivitas politik menjadi dua syarat untuk partisipasi politik. Jumlah penduduk memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi politik, disamping faktor usia dan pendidikan. Semakin luas wilayah dan semakin besar jumlah penduduk, maka akan lebih sulit dalam

meningkatkan partisipasi politik. Misalnya dalam ruang lingkup provinsi, peran gubernur dalam meningkatkan partisipasi politik akan lebih sulit karena luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang banyak. Oleh karena itu, diperlukan peran kepala daerah masing-masing wilayah seperti bupati/walikota, kepala desa, kepala dusun dan sebagainya. Seperti yang dilakukan pemerintah Desa Gonilan yang berhasil meningkatkan minat masyarakat dalam kegiatan politik melalui program Warung *Pethuk*.

Selanjutnya program *mobility broadcasting* sebagai media komunikasi dan interaksi sosial kepada masyarakat memang tidak memiliki efek langsung pada partisipasi politik, tetapi cara itu digunakan untuk menyampaikan demonstrasi diri dari calon terpilih yang mendukung proses demokrasi (de Zúñiga, Molyneux, & Zheng, 2014). Penggunaan media untuk meningkatkan partisipasi politik bersifat positif jika di dalamnya terdapat komunikasi dan diskusi (Bakker & de Vreese, 2011). Kegiatan *mobility broadcasting* ini termasuk kedalam bentuk partisipasi politik tradisional yang kegiatannya meliputi kampanye politik, dan kegiatan relawan ini juga memberi dampak meningkatkan minat masyarakat terhadap partisipasi politik (Kim & Hoewe, 2020). Pengetahuan warga negara tentang calon yang dipilih mengindikasikan sejauh mana demokrasi berfungsi. Agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan pemilih yang terinformasi. Pemilih yang tidak memiliki informasi terkait calon pemimpin yang akan dipilih, mereka tetap membuat pilihan di kotak suara tetapi tidak berdasarkan baik/buruknya calon pemimpin. Itulah gunanya diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka mengenal siapa yang akan dipilih nantinya.

Saat ini, teknologi informasi telah berkembang dengan pesat sehingga segala bentuk informasi dapat diakses dengan cepat. Oleh karena itu, media sosial seperti penggunaan internet untuk akses informasi juga dapat meningkatkan pengetahuan politik warga negara (Pirannejad & Janssen, 2017). Akan tetapi tidak semua masyarakat mampu mengikuti perkembangan zaman, akses informasi masih dengan cara tradisional seperti melalui radio atau media cetak. Televisi juga memiliki pengaruh besar dalam menambah pengetahuan politik masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Survey

Indonesia (2013) tentang minat masyarakat tentang politik, menunjukkan bahwa televisi kurang dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap politik. Masyarakat lebih tertarik menyaksikan film atau sinetron dibanding untuk menyaksikan atau mengikuti berita politik. Oleh karena itu, cara-cara tradisional masih perlu dilakukan karena tidak semua masyarakat bisa mengikuti perkembangan media sosial. *Mobile broadcasting* merupakan salah satu cara tradisional untuk meningkatkan pengetahuan politik, khususnya bagi masyarakat yang kurang mengikuti perkembangan politik melalui media sosial. Akan tetapi berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh Cai & Zhout (2019) menunjukkan bahwa jenis pemaparan yang disampaikan dengan media tradisional kurang berpengaruh dikarenakan minimnya pemaparan bukti melalui media tradisional. Jadi, program *mobile broadcasting* yang dalam pemaparan informasi masih sederhana, sebaiknya didukung oleh foto, audio, atau bahkan video agar masyarakat lebih terpengaruh oleh program *mobile broadcasting* tersebut.

Forum desa juga merupakan salah satu upaya efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dalam kegiatan kelompok diskusi ini akan menumbuhkan rasa untuk “melakukan sesuatu”, mampu mengambil sikap dan mengatasi perbedaan dalam politik (Ekman & Amnå, 2012). Partisipasi politik seseorang dipengaruhi oleh lima hal yaitu partisipasi politik tradisional, pembicaraan atau diskusi politik, pemungutan suara, keterlibatan dalam media sosial, dan pencarian informasi politik secara *online* (Kim & Hoewe, 2020). Forum desa di Gonilan termasuk ke dalam faktor interpersonal pembicaraan politik. Dalam forum tersebut terdapat pembicaraan politik yang berfungsi untuk saling memberikan informasi politik, membujuk, dan/atau memotivasi orang lain. Meskipun terdapat beberapa upaya dalam meningkatkan partisipasi politik, akan tetapi kembali kepada masyarakat, jika minat mencari informasi politiknya kecil maka lama-lama mereka akan menarik diri dari proses politik, jika masyarakat aktif dalam pembicaraan politik, hal ini akan mendorong kelompok masyarakat ini untuk beropini dalam keterlibatan politik (Wojcieszak, Bimber, Feldman, & Stroud, 2016).

Peran masyarakat Desa Gonilan dalam kegiatan pemilihan umum merupakan salah

satu bagian dari perwujudan negara demokrasi. Sebaiknya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat tidak sampai pada kegiatan pemilihan umum, setelah itu upayanya berhenti. Akan tetapi dapat dijadikan habituasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan forum desa perlu dijadikan habituasi karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Ketika masyarakat merasa kebijakan yang dilakukan pemerintah kurang tepat, mereka dapat menyampaikan keluhan melalui forum desa, bahkan keluhan terkait pemerintahan Desa Gonilan sendiri. Untuk menjadi daerah yang maju, diperlukan kritikan dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga sangat diperlukan kritikan dari warga negara. Temuan penelitian Gherghina & Geissel (2017) menyatakan bahwa demokrasi normatif memainkan peran dalam partisipasi politik aktual, artinya bergantung pada bagaimana keputusan politik yang diambil oleh warga untuk kesediaannya terlibat dalam politik atau kurang bersedia terlibat dalam politik. Keputusan yang akan diambil oleh warga bergantung pada konsep pemahaman demokrasi mereka. Jika keputusan yang diambil adalah memilih menjadi warga negara sebagai pengambil keputusan politik, mereka akan merasa perlu memainkan peran aktif. Sebaliknya, jika masyarakat menganggap bahwa para tokoh politik adalah sebagai pengambil keputusan politik utama, maka mereka cenderung kurang aktif untuk ikut serta dalam partisipasi politik. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat bergantung pada pemahaman peran mereka dalam politik. Ketika warga negara sadar bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat bukan di tangan para tokoh politik maka akan tumbuh kesadaran dalam dirinya untuk ikut serta dalam kegiatan keputusan politik. Sebaliknya jika masyarakat tidak paham bahwa peran masyarakat sangat penting dalam kegiatan politik, akhirnya masyarakat merasa bahwa dirinya tidak penting berpartisipasi dalam politik dan akhirnya menganggap segala keputusan adalah wewenang para tokoh politik. Oleh sebab itu, program pemerintah Desa Gonilan dengan mengadakan forum desa sangatlah bermanfaat. Tidak hanya ketika akan diadakan pemilihan umum, tetapi dapat dijadikan kegiatan rutin. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan

pentingnya pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan (*civic cimmunity*) karena memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang negara demokrasi.

## SIMPULAN

Dalam rangka menjalankan otonomi desa, pemerintah desa berperan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Program yang diadakan oleh pemerintah Desa Gonilan antara lain Warung *Pethuk*, forum desa, dan *mobility broadcasting*. Dalam pelaksanaannya, ketiga program ini masih mengalami berbagai kendala seperti masalah dana, waktu pelaksanaan, dan masalah cuaca hujan ketika mengadakan *mobility broadcasting*. Meskipun demikian, program ini efektif diberlakukan di daerah karena memiliki pengaruh positif terhadap masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amer, M. (2009). Political Awareness and its Implications on Participatory Behaviour: A Study of Naga Women Voters in Nagaland. *Indian Journal of Gender Studies*, 16(3), 359-374. DOI:10.1177/097152150901600303
- Averus, A., & Alfina, A. (2020). Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 585-610.
- Arwiyah, M. Y. (2012). Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(1), 85-92.
- Aya, D. (2013). Peranan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Bupati 2010 di Kabupaten Halmahera Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(3), 1-18.
- Aydın Çakır, A., & Şekercioğlu, E. (2016). Public Confidence in the Judiciary: The Interaction Between Political Awareness and Level of Democracy. *Democratization*, 23(4), 634-656. DOI: https://doi.org/10.1080/13510347.2014.1000874
- Badoh, I. Z. F., & Dahlan, A. (2010). Korupsi Pemilu di Indonesia 2010. Jakarta Selatan: Indonesian Corruption Watch.
- Bakker, T. P., & de Vreese, C. H. (2011). Good News for the Future? Young People, Internet Use, and Political Participation. *Communication Research*, 38(4), 451-470. DOI: https://doi.org/10.1177/0093650210381738.
- Boulianne, S. (2020). Twenty Years of Digital Media Effects on Civic and Political Participation. *Communication Research*, 47(7), 947-966.
- Budiardjo, M. (2013). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cai, Y., & Zhout, T. (2019). Online Political Participation in China: Local Government and Differentiated. *The China Quarterly*, 238, 331-352. DOI: 10.1017/S0305741019000055
- Damayanti, R. A., & Syarifuddin, S. (2020). The Inclusiveness of Community Participation in Village Development Planning in Indonesia. *Development in Practice*, 30(5), 624-634. DOI: https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151.
- Dani, W. R. (2010). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal* (Disertasi tidak diterbitkan). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- de Zúñiga, H. G., Molyneux, L., & Zheng, P. (2014). Social Media, Political Expression, and Political Participation: Panel Analysis of Lagged and Concurrent Relationships. *Journal of Communication*, 64(4), 612-634. DOI: https://doi.org/10.1111/jcom.12103
- Ekman, J., & Amnå, E. (2012). Political Participation and Civic Engagement: Towards A New Typology. *Human Affairs*, 22(3), 283-300. DOI: https://doi.org/10.2478/s13374-012-0024-1.
- Enceng., Liestyodono., & Purwaningdyah. (2008). Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 2(1), 33-43.
- Erdoğan, E., & Uyan-Semerci, P. (2017). Understanding Young Citizens' Political Participation in Turkey: Does 'Being Young' Matter? *Southeast European and Black Sea Studies*, 17(1), 57-75. DOI: 10.1080/14683857.2016.1235000
- Fikri, S. (2018). Politik Identitas dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito Dalam Demokrasi Lokal). *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 18(2), 167-181. DOI: https://doi.org/10.19109/tamaddun.v18i2.2701
- Firmansyah, R., & Satmoko, A. A. (2016).

- Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 2013 Kota Mojokerto. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 1(4), 137-151.
- Gherghina, S., & Geissel, B. (2017). Linking Democratic Preferences and Political Participation: Evidence from Germany. *Political Studies*, 65(1), 24-42.
- Hendrik, D. (2010). Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. *Jurnal Demokrasi*, 9(2), 137-148.
- Holmes, F. (10 April 2019). What You Need to Know About Indonesia Ahead of Next Week's Election? Forbes. <https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2019/04/10/what-you-need-to-know-about-indonesia-ahead-of-next-weeks-election/#34a1ca2c7fb7>.
- Kim, B., & Hoewe, J. (2020). Developing Contemporary Factors of Political Participation. *The Social Science Journal*, 00(00), 1-15. <https://doi.org/10.1080/03623319.2020.1782641>
- Kurnaianingsih, N. A. (2013). Klasifikasi Tipologi Zona Perwilayahan Wilayah Peri-Urban di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1(3), 251-264. DOI: <https://doi.org/10.14710/jwl.1.3.251-264>
- Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 1(1), 39-47.
- Lembaga Survei Indonesia. (2013). *Internet, Apatisme, dan Alienasi Politik*. Diakses dari [http://indikator.co.id/uploads/20130723190925.23\\_Juli\\_2013\\_Rilis\\_INDIKATOR.pdf](http://indikator.co.id/uploads/20130723190925.23_Juli_2013_Rilis_INDIKATOR.pdf)
- Liando, D. M. (2017). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14-28.
- Lilleker, D. G., & Koc-Michalska, K. (2017). What Drives Political Participation? Motivations and Mobilization in A Digital Age. *Political Communication*, 34(1), 21-43.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis*. London: SAGE Publications.
- Mudjiyanto, B. (2013). Literasi Internet dan Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih dalam Aktifitas Pemanfaatan Media Baru. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 16(2), 81-110. DOI: <https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160101>
- Muhaling, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. *Jurnal Politico*, 3(2), 36-42.
- Nawawi, A. (2009). Partisipasi Politik Perempuan: Studi Kasus Bupati Perempuan Dalam Pemerintahan Kabupaten Karanganyar (Skripsi tidak diterbitkan). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Patmisari., & Gafur, A. (2019). Pengaruh Gender Terhadap Kesadaran Politik Siswa Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 207-214. DOI: <https://doi.org/10.17977/um019v4i1p207-214>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. California: Sage Publishing.
- Pirannejad, A., & Janssen, M. (2019). Internet and Political Empowerment: Towards A Taxonomy for Online Political Empowerment. *Information Development*, 35(1), 80-95.
- Putri, M. P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *Journal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 30-43.
- Robertson, C. T., Mourão, R. R., & Thorson, E. (2020). Who Uses Fact-Checking Sites? The Impact of Demographics, Political Antecedents, and Media Use on Fact-Checking Site Awareness, Attitudes, and Behavior. *The International Journal of Press/Politics*, 25(2), 217-237.
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 6(1), 87-108.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Suharyanto, A. (2016). Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 123-136.
- Sumantri, E. (2010). Makalah: Pendidikan Kewarganegaraan Masyarakat (*Community Civics*) (Makalah tidak diterbitkan).

- The Economist Intelligence Unit. (2019). Democracy Index 2019: A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest. Diakses dari [https://www.eiu.com/public/topical\\_report.aspx?campaignid=democracyindex2019](https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=democracyindex2019)
- Toyamah, N., Febriany, V., & Mawardi, M. S. (2002). Mencari Alternatif Penyempurnaan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: *Beberapa Pelajaran dari Daerah*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU
- Usfinit, Y., Suprojo, A., & Setyawan, D. (2014). Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 38-45.
- van Houwelingen, P. (2017). Political Participation and Municipal Population Size: A Meta-Study. *Local Government Studies*, 43(3), 408-428. DOI: <https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1300147>.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.
- Wirahmat, H. (2013). *Analisis Tingkat Partisipasi Politik Ditinjau dari Status Sosial Ekonomi Studi Lapangan Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar* (Disertasi tidak diterbitkan). Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Wojcieszak, M., Bimber, B., Feldman, L., & Stroud, N. J. (2016). Partisan News and Political Participation: Exploring Mediated Relationships. *Political Communication*, 33(2), 241-260. DOI: <https://doi.org/10.1080/10584609.2015.1051608>
- Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. California: SAGE Publications.
- Yuliantina, M. (2016). *Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan* (Skripsi tidak diterbitkan). Lampung: Universitas Lampung.